

STUDI ETIS TERHADAP KETIDAKTAATAN SIPIL DARI PERSPEKTIF TEMA “KETAATAN” DALAM PERJANJIAN BARU

Ray Regynaldi¹

PANDANGAN UMUM

Kehidupan orang Kristen tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sebagai warga negara di dunia. Sebagai warga negara, orang Kristen sudah seharusnya mentaati segala peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Peraturan yang dibentuk itu idealnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan menentukan tanggung jawab terhadap negara, juga untuk mengarahkan warga negaranya untuk berada pada jalur yang benar, ada sanksi-sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran. Maka peraturan yang dibentuk adalah untuk kebaikan warga negara bukan untuk menyusahkan atau bahkan menekan warga negaranya, sehingga sudah semestinya orang Kristen pun yang adalah warga negara harus bersikap taat kepada pemerintah yang terwujud di dalam mentaati setiap peraturan yang diberlakukan.

Ketaatan seorang warga negara terhadap negara adalah hal yang penting, tetapi negara tidak luput juga menghasilkan produk-produk hukum yang justru tidak memberikan jaminan pada hak-hak yang seharusnya diterima warga negaranya, kebijakannya justru terasa menekan golongan minoritas (diskriminasi), peraturannya bertentangan dengan ideologi negara, bahkan bertentangan dengan iman Kristen sendiri. Seperti yang dapat kita lihat di dalam UU Sisdiknas, UU Perkawinan, UU Pornografi, Peraturan Daerah Aceh, dan yang lainnya. Bahkan sikap-sikap dari pejabat membuat orang Kristen seharusnya berpikir apakah harus taat mutlak kepada pemerintah. Di dalam posisi ini orang Kristen diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat kepada negara biarpun tertindas (bahkan harus mengorbankan iman Kristen), atau memilih tidak taat, yang disebut sebagai ketidaktaatan sipil. Konsep ketidaktaatan sipil seringkali menjadi rancu dengan tindakan yang jahat, pemberontakan, kriminal, bahkan pemahaman yang muncul seringkali ketidaktaatan sipil identik dengan aksi anarkis. Para Rasul Sehingga tidak

sedikit orang Kristen yang tidak peduli (meskipun tahu) apapun kebijakan publik yang ada, yang penting harus taat, alasan lainnya karena banyak orang Kristen juga memiliki pemahaman yang tidak tepat akan hubungan negara dan gereja, kedudukan orang percaya sebagai warga negara, dan yang lainnya. Tindakan orang Kristen, termasuk di dalam kehidupan bernegara seharusnya didasarkan pada pemahaman Alkitab yang benar.

Orang Kristen mendasarkan pada Roma 13:1-7 di dalam kehidupan bernegara. Sebenarnya kita perlu mengkaji lagi akan bagian yang ditulis Paulus ini dengan bagian-bagian lain di dalam Perjanjian Baru. Apakah orang Kristen harus bersikap pasrah saja, dengan memegang prinsip bahwa Tuhan yang akan membela? Apakah ketidaktaatan selalu merupakan sesuatu yang jahat? Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif akan hal ini, maka akan melihat tema ketaatan di dalam keseluruhan ajaran Perjanjian Baru, yang nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai pengertian ketidaktaatan sipil.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang ketaatan dan ketidaktaatan maka orang percaya dan gereja sebagai komunitas orang percaya dapat mengerti dan mengambil sikap. Salah satu fungsi gereja adalah menyuarakan suara kenabian, bukan hanya di dalam menegur dosa, menyerukan pertobatan dan pemulihan, tetapi harus dapat menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di dalam suatu negara. Semuanya ini bukan dilakukan secara membabi buta, tetapi harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, serta bukan di dalam posisi yang terdesak atau terjepit baru bersuara. Pada saat ini banyak gereja yang kehilangan akan hal tersebut, sehingga orang Kristen sebagai warga negara tidak paham akan posisinya di dalam negara, tidak tahu sampai sejauh mana dia harus taat atau tidak taat kepada negara.

Pengertian Ketidaktaatan Sipil secara Umum

Ketidaktaatan sipil sering diartikan perlawanan terhadap pemerintah yang dilakukan secara frontal bahkan disertai dengan cara-cara kekerasan, sehingga ketika membicarakan tentang ketidaktaatan sipil sudah mempunyai konsep yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Jika melihat secara etimologinya, maka ketidaktaatan sipil terdiri dari kata ketidaktaatan yang terdiri dari kata tidak dan taat, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini dapat diartikan sebagai pengingkaran, penolakan atau penyangkalan, sedangkan kata taat memiliki

penjelasan senantiasa menurut (yang ditujukan kepada Tuhan atau pemerintah), patuh.²

Pemakaian kata sipil dapat mempunyai tiga pengertian.³ *Pertama*, sipil dapat berarti sopan atau beradab, pengertian ini untuk membedakan antara orang-orang beradab dengan orang-orang yang barbar di masa yang lalu. *Kedua*, kata sipil berarti orang biasa atau rakyat biasa, bukan pejabat publik atau aparat negara. Secara sosial mempunyai arti sebagai lembaga atau institusi yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Masyarakat sipil mempunyai kewajiban yang otonom dan negara berfungsi melindungi dan memfasilitasinya, dan menertibkan ketika masyarakat sipil sudah tidak sipil lagi (sopan). *Ketiga*, sipil berarti bukan militer. Pemerintah sipil adalah pemerintah yang tidak dikuasai militer. Sehingga jika kita merangkainya berarti penolakan atau pengingkaran dari rakyat biasa, bukan pejabat, bukan militer, untuk menurut atau patuh, di dalam hal ini kepada pemerintah.

Warga sipil juga sebenarnya dapat dibedakan dengan warga negara, seorang warga sipil belum tentu warga negara, tetapi seorang warga negara sudah pasti warga sipil juga. Di dalam bahasa Inggris dibedakan antara *civil* dan *citizen*, di mana *civil* berhubungan dengan orang-orang yang hidup di suatu negara, sedangkan *citizen* adalah seseorang yang mempunyai hak yang berhubungan dengan statusnya berdasarkan hukum di negara tersebut.⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia pun membedakannya dengan jelas, bahwa warga negara adalah penduduk suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara.⁵ Tetapi berbicara tentang ketidaktaatan sipil, maka lingkup kesipilan itu sendiri adalah di dalam wilayah atau teritorial negaranya sendiri bukan di dalam lingkup negara orang lain, karena jika dalam lingkup wilayah negara lain tidak dapat dikategorikan sebagai ketidaktaatan sipil, karena tidak mempunyai keterkaitan secara khusus.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 846.

³ Togardo Siburian, “Diktat Kuliah Etika Sosial Politik” (Bandung: SITB, 2010), tidak diterbitkan.

⁴ *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 210-211.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1008.

Ketidaktaatan sipil bukan di dalam pengertian melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan berbagai tindak kekerasan, karena itu ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*) harus dibedakan dengan kekacauan sipil (*civil disorder*). Ketidaktaatan sipil menurut *Black's Law Dictionary* adalah “*A deliberate but nonviolent act of lawbreaking to call attention to a particular law or set of laws of questionable legitimacy or morality.*”⁶ Sedangkan di dalam kamus Webster dikatakan ketidaktaatan sipil adalah salah satu bentuk ketidaktaatan terhadap hukum negara dalam hal membayar pajak.⁷ Hal ini mengacu pada apa yang dilakukan Henry D. Thoreau di dalam penolakannya untuk membayar pajak, tetapi sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas dari penolakan untuk membayar pajak. Sedangkan di dalam *Dictionary of Theories*,⁸ ketidaktaatan sipil diartikan sebagai “*Politics or Law Theory of principled law breaking.*”

Jika kita melihat penjelasan ini, ketidaktaatan sipil bukan semata-mata tindakan anarkis yang dilakukan oleh rakyat di dalam melawan kebijakan pemerintah. Malah ketidaktaatan sipil berarti suatu tindakan yang disengaja, tetapi tanpa kekerasan untuk menunjukkan bahwa hukum yang dikeluarkan pemerintah atau di dalam setiap tindakannya terjadi ketidaksesuaian dengan rasa keadilan rakyat banyak atau sebagian golongan baik secara legal maupun secara moral. Tujuannya adalah sebagai tindakan “menyadarkan” pemerintah terhadap kebijakan hukum yang dilakukan, bukan hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Sedangkan kekacauan sipil (*civil disorder*) adalah “*A public disturbance involving three or more people who commit violent acts that cause immediate danger or injury to people or property.*”

Jelas jika melihat penjelasan di atas bahwa kekacauan sipil dilakukan secara anarkis, menggunakan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan rakyat atau properti yang dimiliki. Ketika membicarakan tentang ketidaktaatan sipil, menurut Gandhi kedua padanan kata ini sama pentingnya, maksudnya adalah bahwa jika “ketidaktaatan” tanpa sipil, disiplin, maka pasti akan menghancurkan.⁹

⁶ Bryan A Garner Ed., *Black's Law Dictionary Seventh Edition* (ST. Paul: West Group, 1999) 239.

⁷ *Webster's New Collegiate Dictionary*, 204

⁸ Jennifer Bothamley, *Dictionary of Theories* (Detroit: Visible Ink Press, 1993) 91.

⁹ James F. Childress, *Civil Disobedience and Political Obligation* (London: Yale University, 1971) 7.

Ketidaktaatan sipil tidak dapat disamakan dengan pemberontakan, karena tidak semua perlawanan dapat dikategorikan sebagai ketidaktaatan sipil. Pemberontakan di sini dalam arti menjatuhkan dan merebut penguasa yang berkuasa. Ketidaktaatan sipil dapat kita katakan sebagai penolakan untuk taat kepada hukum negara, karena bertentangan dengan keadilan, iman, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa ketidaktaatan sipil adalah suatu tindakan yang bersifat ilegal terhadap hukum yang berlaku karena tidak mentaati yang seharusnya. Ketidaktaatan sipil dibedakan dengan pemberontakan di dalam segi moralnya, ketidaktaatan sipil sekalipun secara yuridis merupakan tindakan yang melawan hukum, tetapi dilakukan bukan untuk kepentingan politis, tetapi ada nilai moral yang diutamakan. Nilai moral inilah yang membedakan antara pemberontakan dengan ketidaktaatan sipil, di mana ketidaktaatan sipil dapat dibenarkan dengan alasan moral. Revolusi dilakukan jelas ilegal secara hukum sekaligus tidak ada kebaikan moral di dalamnya, karena ketika melakukan pemberontakan itu ada maksud di dalam menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat di dalam tujuannya, ketidaktaatan dilakukan dengan fokus untuk menyatakan kebenaran bukan berfokus pada tindakannya, sedangkan pemberontakan dilakukan lebih berfokus pada aksinya bukan pada tujuan untuk menegakkan kebenaran.¹⁰

Ketidaktaatan sipil bukan diiringi tujuan pribadi di dalam kepentingan politik, tetapi untuk menuntut akan kebenaran. Maka ketidaktaatan sipil jelas berbeda dengan tindakan perlawanan lain, termasuk pemberontakan. Sehingga jelas dapat terlihat perbedaannya antara ketidaktaatan sipil dan pemberontakan, yaitu baik di dalam prinsip-prinsipnya maupun di dalam caranya. Dalam banyak kasus ketidaktaatan pada hukum negara dengan alasan moral dapat diterima, tetapi di dalam praksis sosial, gerakan ini dapat menimbulkan sejumlah persoalan. Gerakan ketidaktaatan dalam konteks hukum yang besar dan kompleks mempunyai kemungkinan adanya pertentangan dari kelompok yang lain juga, hal ini yang terkadang dimanfaatkan untuk mengadu keduanya.¹¹

Ketidaktaatan Sipil juga di dalam prinsipnya berbeda dengan tindakan kriminal atau kejahatan. Kedua tindakan ini berbeda, meskipun keduanya adalah

¹⁰ Lihat Robert T. Hall, *The Morality of Civil Disobedience* (New York: Harper Torchbooks, 1971) 13-23.

¹¹ A. Sudiarja, "Negara Hukum Dan Civil Disobedience" dalam *Etika Politik dalam Konteks Indonesia* ed. Eddy Kristiyanto (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 168.

tindakan yang melawan hukum yang berlaku. Keduanya dibedakan dengan motif yang melatarbelakanginya, ketidaktaatan sipil dibenarkan karena pertimbangan moralnya yang mementingkan akan kebenaran dan keadilan, sedangkan tindakan kriminal dilakukan karena hasrat untuk mementingkan atau menguntungkan pribadi maupun kelompok.¹² Hal lain yang membedakan antara ketidaktaatan sipil dengan tindakan kriminal pada umumnya adalah penilaian publik. Ketika suatu tindakan ketidaktaatan sipil dilakukan, memang itu melawan hukum, tetapi hal ini dapat dinilai oleh publik bukan sebagai tindakan kriminal, karena masyarakat dapat melihat tindakan tersebut benar untuk dilakukan. Berbeda dengan tindakan kriminal pada umumnya yang langsung mendapat cap sebagai tindakan yang melanggar rasa keadilan masyarakat, apa pun tindakannya tersebut.¹³

Jadi perbedaan yang mendasar antara ketidaktaatan sipil dan tindakan kejahatan atau kriminal adalah di dalam perspektif moralnya. Jika seseorang atau kelompok melakukan ketidaktaatan sipil yang otomatis merupakan tindakan melanggar hukum, maka harus didasari dengan alasan moral dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dilakukannya adalah mempunyai dasar kebenaran yang kuat dibandingkan dengan tindakan pelanggaran hukumnya tersebut. Di dalam tindakan yang dilakukan juga berbeda, ketidaktaatan sipil dilakukan dengan tindakan yang tanpa kekerasan dan tidak merugikan pihak lain secara fisik atau materi.

Pandangan Orang Kristen terhadap Ketidaktaatan Sipil

Banyak orang Kristen juga yang mempunyai pandangan yang tidak tepat mengenai ketidaktaatan sipil, di antaranya:

Pasif Mutlak

Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa negara dan gereja terpisah secara mutlak, tidak ada hubungan. Maka orang Kristen pun mempunyai pandangan bahwa orang percaya juga tidak ada kaitan dengan Gereja. Pemahaman ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman aliran Gereja. Seorang pengajar Kristen mengambil posisi mutlak pasif terhadap negara, karena

¹² Hall, *The Morality...*, 24.

¹³ Ibid, 27.

sesuai dengan pandangan Gerejanya.¹⁴ Pandangan ini berakar juga terkait pada pandangan di masa lalu walaupun tidak seekstrem pada masanya. Kita harus membedakan antara Anabaptis pada masa reformasi dengan Gereja Baptis sekarang. Anabaptis pada masa awal memandang bahwa negara adalah bagian dari sistem dunia yang jahat dan merupakan oposisi dari kerajaan Allah.¹⁵ Dengan pandangan seperti itu maka orang percaya harus memisahkan diri dari negara, sehingga orang percaya bersikap apatis atau tidak berbagian apapun di dalam negara, mereka tidak boleh ikut pemilu, bekerja sebagai pegawai negara, berkecimpung di dunia militer, dan hal-hal lain yang melibatkan mereka dengan pemerintah.¹⁶

Meskipun pada saat ini mereka tidak mempunyai pandangan yang seketat dahulu, bahwa negara adalah jahat, tetapi tetap dipandang orang Kristen tidak akan terlibat dengan urusan negara. Mereka secara umum tetap menaati peraturan yang ada tetapi memandang negara tidak mempunyai otoritas terhadap orang percaya, begitu juga sebaliknya, Gereja tidak mempunyai otoritas terhadap orang-orang yang tidak percaya. Sikap lainnya yang muncul juga adalah pasif di dalam arti menyetujui apa yang menjadi kebijakan negara, tanpa ada keinginan untuk mengoreksinya sekalipun salah.¹⁷ Sikap ini adalah cara Gereja untuk mencari aman di tengah-tengah ketidakbenaran, sikap ini menjadikan Gereja hanya jadi bulan-bulanan negara di dalam permainan politiknya.

Penyampaian Kebenaran Tanpa Demonstrasi

Pandangan lain dari seorang pendeta mengatakan bahwa dia memaparkan bahwa orang Kristen sebagai seorang warga negara harus berbuat sesuatu untuk negara, dengan posisi negara dan Gereja terpisah. Meskipun negara dalam keterpisahan dengan Gereja, tetapi tugas negara adalah membina kerukunan

¹⁴ Guru Kristen C, mengajar di suatu sekolah di Bandung, pembicaraan pada tanggal 25 Oktober 2011.

¹⁵ Doug Bandow, *Beyond Good Intentions: A Biblical View of Politics* (Westchester: Crossway Books, 1988) 130.

¹⁶ John Eidsmoe, *God and Caesar* (Westchester: Crosswaybooks, 1984) 14.

¹⁷ Ini pernah terjadi ketika adanya sikap gereja yang setuju saja pada penguasa di masa Orde Baru, di mana Dewan Pentakosta Indonesia mengajak jemaatnya untuk memilih Golkar pada pemilu 1992. Lih. Benyamin Fleming Intan, “*Caesar’s Coin* dan Hubungan “Gereja Negara” dalam Era “Orde Baru.” Suatu Pandangan dari Perspektif Reformed” dalam *Perjuangan Menantang Zaman*, Hendra G. Mulia, ed. (Jakarta: Reformed Institute Press, 2000) 193.

antar umat beragama. Aspirasi orang Kristen di dalam kehidupan berpolitik adalah tidak perlu untuk membuat partai politik, tetapi masuk ke dalam parpol-parpol besar. Dalam kondisi seperti inilah perjuangan yang dilakukan orang Kristen di dalam menegakkan kebenaran. Ketidaktaatan sipil yang dipahami sebagai perjuangan penegakan kebenaran seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang duduk dalam lembaga negara. Ketidaktaatan sipil dengan jalan melakukan demonstrasi, aksi mogok makan hanya akan membuat kacau negara. Dengan membandingkan kondisi di China, yang tanpa adanya demonstrasi, negara maju dan tidak kacau. Di dalam pendapatnya cara terbaik orang Kristen dalam menyampaikan kebenaran yang semestinya adalah dalam bentuk tulisan baik di media cetak maupun dalam bentuk buku.¹⁸ Pandangan ini mempunyai pemahaman yang kurang lengkap tentang ketidaktaatan sipil, sehingga memandang seperti ini ketidaktaatan sipil adalah sesuatu yang kurang pas.

Ekstrem Kristen

Fenomena lainnya yang muncul di kalangan orang Kristen adalah memandang negara yang tidak dipimpin orang Kristen adalah negara yang tidak baik, negara yang tidak perlu didukung. Hal ini terungkap di dalam pembicaraan dengan warga jemaat gereja, yang berpandangan bahwa negara yang paling baik adalah negara yang dipimpin oleh orang Kristen, hukumnya hukum Kristen, semuanya berbau Kristen. Masih banyak orang Kristen yang mengidamkan suatu negara Kristen juga. Sikap yang ditunjukkan adalah penolakan untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, karena bukan Kristen. Pandangan dan sikap tersebut adalah bukan sebagai bentuk dari ketidaktaatan sipil, bukan dalam posisi sebagai warga negara yang mempunyai jiwa nasionalisme. Hal ini tidak sesuai dengan kebenaran yang diungkapkan oleh firman Tuhan, di mana umat Tuhan mempunyai jiwa nasionalis, kemajuan bangsa bukan untuk orang Kristen.

Gereja yang Berpolitik Praktis

Banyak orang Kristen yang mempunyai pandangan bahwa orang Kristen sebagai warga negara harus mempunyai kontribusi di dalam negara. Keprihatinan ini disampaikan oleh seorang penginjil,¹⁹ menurutnya sampai saat ini kontribusi orang Kristen di dalam negara sangat kurang sekali. Dengan demikian, ketidaktaatan sipil adalah diperlukan untuk menegakkan keadilan dan

¹⁸ Pendapat Pdt. A, hamba Tuhan Gereja X pada tanggal 17 November 2011.

¹⁹ Ev. B seorang hamba Tuhan, pada tanggal 17 November 2011.

menyatakan kebenaran, bahkan di dalam hal ini Gereja dapat terlibat secara langsung. Gereja dapat mengajukan protes-protes dengan berdemo, hamba Tuhan (pendeta atau penginjil) dapat menjadi politikus, dengan catatan meninggalkan jabatannya terlebih dahulu, partai politik Kristen pun tidak dipandang sebagai sesuatu yang salah.²⁰ Kemudian di dalam melihat munculnya perda Injil adalah sebagai sesuatu yang baik, agar kekristenan mewarnai masyarakat, yang nantinya dapat menciptakan masyarakat Kristen yang sesuai firman Tuhan. Pandangan ini sama dengan Gereja yang berpolitik praktis.²¹ Meskipun di dalam pandangan ini dia mengungkapkan tentang keterpisahan negara dan Gereja, tetapi Gereja tetap mempunyai panggilan untuk menyatakan kebenaran. Pandangan ini mirip dengan pandangan Calvin di dalam memandang hubungan antara Gereja dengan negara, di mana walaupun dalam posisi yang terpisah tetap ada kecondongan pada Gereja. Calvin mempunyai pendapat bahwa hubungan negara dan gereja adalah sejajar. Hubungan negara dengan gereja sendiri bukan terpisah secara mutlak melainkan ada hubungan koordinasi, di mana Gereja mempunyai tugas untuk “merenovasi” dunia termasuk di dalamnya adalah negara, sedangkan negara mempunyai tugas untuk membantu Gereja di dalam Kristenisasi. Kuyper mengatakan bahwa Negara seharusnya menghormati kedaulatan Gereja. Di dalam pandangan Calvinis ini kita dapat melihat adanya kecondongan yang lebih pada superioritas gereja, hal ini terjadi karena Calvin ketika itu melihat di dalam konteks Jenewa, yang dapat kita lihat ketika dewan kota menghukum bidat, di mana tampak bahwa negara sebagai kepanjangan tangan Gereja bukan di dalam posisi yang sejajar.

Posisi Terjepit

Banyak pandangan yang melihat bahwa ketidaktaatan sipil dilakukan bila orang Kristen dalam posisi yang sudah terpojok. Ketika iman Kristen diperhadapkan dengan hukum negara yang melarang penyembahan pada Allah, barulah ketidaktaatan sipil dilakukan. Pandangan ini juga dikemukakan oleh seorang hamba Tuhan,²² bahwa menurutnya ketidaktaatan sipil orang Kristen tidak boleh terjadi ketika negara tidak menyentuh pada keimanan orang Kristen.

²⁰ Lih. Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) 53-56.

²¹ Gereja yang berpolitik praktis maksudnya adalah gereja ikut serta dalam usaha memperoleh kekuasaan politik. Lih. J. Soedjati Djiwandono, *Gereja Dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2003) 48-51

²² Pendeta D, pada tanggal 21 November 2011 di Bandung.

Banyaknya konsep tentang ketidaktaatan sipil seperti ini, berpijak pada pemahaman Roma 13:1-7 yang dijadikan sentral teologi dalam hubungan orang Kristen dan negara. Lebih lanjut lagi posisi keterjepitan ini, tidak menyalahi pada panggilan orang Kristen di dalam negara juga sebagai warga Kerajaan Allah.²³ Hal ini juga mengacu pada beberapa sikap yang dilakukan di dalam Alkitab seperti yang dilakukan Daniel, Sadrakh, Mesak, Abednego dan yang lainnya. Saat perintah negara bertentangan dengan perintah Allah itulah saatnya untuk tidak taat kepada negara.²⁴ Posisi ini diambil ketika kekuasaan negara diperhadapkan dengan kekuasaan Allah, maka saat itulah ketidaktaatan sipil dilakukan sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah. Pandangan ini mempunyai kesamaan dengan pemikirannya yang Geisler ungkapkan di dalam pengambilan keputusannya, sesuai dengan cara etika tingkatannya.²⁵

Ketidakmengertian

Sebagian orang Kristen lagi menyatakan ketidakmengertian akan konsep ketidaktaatan sipil.²⁶ Dimulai dengan ketidakmengertian tentang kesipilan itu sendiri, yang memandang sampai ke institusi keluarga bukan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah ini ketidaktaatan sendiri merupakan istilah yang akrab dengan mereka. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari sikap ketaatan yang sangat dipegang oleh orang Kristen. Komunitas Kristen selalu menekankan ketaatan-ketaatan serta tanda-tanda penghormatan yang nyata, baik dari anak kepada orang tua, istri terhadap suami, hamba kepada tuan, termasuk kepada penguasa (negara atau pemerintah).²⁷

²³ Lih. Charles C. Ryrie, *Biblical Answer to Contemporary Issues* (Chicago: Moody Press, 1991) 11-21.

²⁴ Francis A. Schaeffer, *A Christian Manifesto* (Westchester: Crossway Books, 1981), hl. 89-91.

²⁵ Lih. Norman Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu* (Malang: SAAT, 2001) 306-327.

²⁶ Hasil dari beberapa pendapat orang Kristen dari berbagai kalangan, baik hamba Tuhan, mahasiswa teologi, jemaat.

²⁷ C. S. Lewis, *Mere Christianity* terj. Grace P. Christian (Bandung: Pionir Jaya, 2006) 126.

Pemicu Ketidaktaatan Sipil

Ketidaktaatan sipil dilakukan bukan dilakukan dengan serampangan dan tanpa arah, sekelompok masyarakat atau individu dapat melakukan ketidaktaatan sipil karena adanya pemicu terlebih dahulu baik itu kebijakan pemerintah maupun sikap aparat negara sendiri di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memunculkan adanya ketidakadilan. Tetapi perlu dicatat bahwa ketidaktaatan sipil ini bukan dilakukan jika sudah berada di dalam keadaan yang terpojok atau terdesak, tetapi dilakukan sebagai usaha sadar, sistematis, terstruktur untuk menentang dan menantang kekuasaan negara yang di dalam kebijakan publiknya tidak adil bagi masyarakat.²⁸

Diskriminasi Gender, Etnis dan Agama

Ketidaktaatan sipil pernah terjadi karena diskriminasi salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Martin Luther King, di mana King berjuang untuk kesamaan hak untuk kaum kulit hitam di Amerika Serikat, dipandanginya sebagai ancaman mendasar bagi demokrasi dan moral Amerika. Hal ini merupakan keharusan yang niscaya yang menantang gereja.²⁹ Semua warga negara seharusnya kedudukannya sama di muka hukum, tetapi di dalam praktiknya seringkali banyak diskriminasi yang terjadi.

Ketidakadilan Sosial: Kemiskinan, Upah Buruh

Ketidakadilan sosial ini berpautan biasanya pada masalah kesejahteraan secara ekonomi bagi warga negara. Cita-cita bangsa ini adalah membawa kesejahteraan bagi rakyat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi. Di dalam sila kelima Pancasila juga disebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sukarno menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, cukup sandang, cukup pangan.³⁰

²⁸ Togardo Siburian, “Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Kristen”, 50.

²⁹ John W. De Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi* terj. Martin Lukito Sinaga (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995) 141-148

³⁰ Sukarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Gunung Agung, 2001) 146.

Kegagalan Menyelesaikan Kasus HAM

Hak Asasi Manusia adalah isu yang paling sensitif pada saat ini. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau yang hakiki dari seorang manusia, semuanya ini sudah dirangkumkan di dalam Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB, di mana Indonesia menjadi anggotanya juga. Beberapa hak itu adalah, hak untuk memeluk agama, hak untuk berpindah agama, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak orang tua untuk mendidik anaknya, hak mendapatkan pekerjaan, hak milik.³¹ Dilanggarnya Hak Asasi Manusia ini dapat memicu ketidaktaatan sipil, karena perlindungan HAM sangat dijunjung dunia internasional, dan hal ini pun dengan jelas diatur di dalam UUD 1945.³² HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati serta dilindungi oleh pemerintah.³³

Korupsi Berjamaah dan Kepincangan Penegakan Hukumnya

Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Masalah korupsi ini sepertinya sudah menjadi “makanan” sehari-hari di dalam pemberitaan media massa. *Indonesian Corruption Watch* mengungkapkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sudah terstruktur sedemikian rupa hingga hampir sempurna. Sebuah pendapat mengatakan bahwa korupsi akan terus berulang karena merupakan sebuah masalah politik, yang membutuhkan investasi tambahan oleh pemerintah.³⁴ Menurut J. E. Sahetapy, hukum di Indonesia sudah menjadi rusak dan rancu, bukan karena isi dari hukum itu sendiri yang rancu sehingga menabrak berbagai esensi kebenaran, baik itu HAM, diskriminasi, tetapi lebih kepada mentalitas manusianya.³⁵

³¹ Lihat *Universal Declaration of Human Rights* pasal 17-19, 23, 26.

³² Moh. Hatta mengatakan bahwa Hak-hak asasi itu perlu dicantumkan dalam UUD untuk mencegah supaya kekuasaan negara jangan sampai absolut. Lih. A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 112.

³³ *Ibid*, 74.

³⁴ Theodore M. Smith, “Korupsi, Tradisi dan Perubahan di Indonesia” dalam *Korupsi Politik*, Mochtar Lubis dan James C. Scott ed., (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) 68-69.

³⁵ J. E. Sahetapy, “Hukum dan Iman Kristiani” dalam *Perjuangan Menantang Zaman*, Hendra G. Mulia, ed. (Jakarta: Reformed Institute Press, 2000) 234.

Bertentangan dengan Iman

Di Indonesia dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kebijakan untuk membentuk peraturan daerah. Beberapa daerah di Indonesia membentuk peraturan daerah yang begitu kental dengan muatan agama tertentu. Di dalam hal ini termasuk pada Perda Pyariah, Perda Injil. Keterlibatan negara di dalam keagamaan akan menjadikan agama itu terdistorsi di dalam berbagai aspeknya.³⁶ Iman termasuk di dalam ranah pribadi setiap orang, yang seharusnya tidak dapat dicampuri oleh pihak mana pun.

Demokrasi Semu

Kekuasaan suatu rezim di dalam satu negara dalam jangka waktu yang sangat panjang menggelisahkan rakyat. Permasalahan di dalam demokrasi erat kaitannya dengan permasalahan pemilu, berdasarkan arti katanya sendiri sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini pernah terjadi di Indonesia ketika dinasti Soeharto memerintah selama 32 tahun, di masa ini juga gereja tidak pernah menghadapinya secara *prophetic*, tetapi secara *priestly* yang hanya berkutat pada doa-doa untuk bangsa dan negara, tanpa berbuat sesuatu.³⁷ Beberapa tahun belakangan ini hal yang sama juga terjadi di belahan dunia Afrika dan Asia Tengah yang sangat kental akan pemerintahan yang otoriter.

Kebebasan Beragama dan Kebebasan Beribadah yang Ditekan

Indonesia di dalam UUD 1945 menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya itu, tetapi perlindungan terhadap golongan agama minoritas sepertinya tidak terealisasi. Kebebasan beragama adalah kebebasan seseorang untuk memilih agamanya bahkan berganti agama asalkan tidak mengacau dan merugikan negara, karena ini adalah hak asasi yang dasar. Kebebasan beragama yang ini tidak boleh dihalangi oleh siapapun termasuk negara, tidak boleh diatur dalam peraturan publik apa pun bentuknya karena termasuk dalam ranah privat. Kebebasan beragama ini berkaitan erat dengan kebebasan beribadah yang bersumber pada

³⁶ Carl H. Esbeck, "Equal Treatment: Its Constitutional Status" dalam *Equal Treatment and Societal Pluralism*, Stephen V. Monsma & J. Christopher Soper, ed. (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2003) 11.

³⁷ Saut Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) 241.

Allah yang menguasai hati nurani manusia yang bebas, tanpa kecuali, siapa pun, di mana pun, sesuai keadilan dan kebenaran di masyarakat.³⁸

DIFERENSIASI KETAATAN DALAM ARTI UMUM DAN KETAATAN DALAM LINGKUP SOSIAL

Di dalam bahasa Indonesia kata taat, takluk dan tunduk sering dipakai secara bergantian di dalam pengertian yang sama, di dalam bahasa Inggris pembedaannya lebih terlihat ketika membedakan antara *obey*, *submit*, dan *subject* bahkan *faithful*. Sedangkan di dalam bahasa Yunani kata taat atau ketaatan menurut Vine's Expository Dictionary of New Testament Words dapat terdiri dari beberapa kata yaitu *u`pakou,w* (*hupakouo*), *pei,qw* (*peitho*), *pei,qarce,w* (*peitharacheo*), dan sebagai lawan dari ketaatan adalah *apeiqe,w* (*apeitheo*).<sup>39</sup> Kata yang sejajar dengan ketaatan juga adalah *u`pota,ssw* (*hupotassō*) yang di dalam bahasa Inggris sebagai *subject*. Di dalam menjelaskan tentang ketaatan kata-kata ini dipakai secara bergantian atau bahkan berbarengan. Dari susunan ayat yang telah dipaparkan dapat dilihat berbagai jenis ketaatan, yaitu ketaatan yang bersifat umum, yaitu ketaatan yang berpusat karena otoritas Allah, ketaatan pribadi Kristus di dalam kehidupan-Nya, ketaatan yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan juga hubungan manusia dengan manusia. Dari beberapa bentuk ketaatan ini menunjukkan perbedaan dari otoritas dan derajat ketaatannya, yaitu mutlak dan relatif, sempurna dan tidak sempurna.

Ketaatan Yesus Kristus

Ketaatan yang paling sempurna adalah ketaatan Kristus kepada Allah Bapa dalam menjalani misi-Nya di dunia. Paulus dalam Roma 5:19 dan Filipi 2:8 menjelaskan ketaatan Kristus mempunyai makna yang sangat mendalam dan tidak dapat dilakukan oleh siapa pun juga selain oleh Yesus Kristus sendiri. Ketaatan disini menggunakan kata *hupakoē* dan *hupēkoos* keduanya mempunyai arti yang sederajat sebagai ketaatan atau penundukkan diri. Kata yang kedua *hupēkoos* secara harfiah mempunyai arti memberikan telinga untuk mendengarkan. Ketaatan di sini dimulai dengan mendengarkan apa yang harus dilakukan. Kata ini mempunyai kesamaan dengan pembelaan Stefanus ketika dia

³⁸ Togardo Siburian, "Demokrasi, Politik, dan Keprihatinan Kristen di Indonesia" dalam *Jurnal Teologi Stulus Volume 6* (Bandung: STTB, 2007) 26.

³⁹ W.E. Vine, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Iowa: Riverside Books And Bible House) 796.

menceritakan kembali ketidaktaatan bangsa Israel (Kisah Para Rasul 7:39), yang mempunyai arti setara dengan ketidaktaatannya bangsa Israel, karena mereka tidak memberikan telinga mereka untuk mendengarkan. Yesus Kristus menundukkan diri-Nya untuk taat kepada Allah Bapa, sekalipun Dia mempunyai otoritas juga. Kegigihan Yesus di dalam menantang keadaan pada zaman-Nya, berdampak Yesus dicap sebagai sosok yang revolusioner. Sekalipun Dia mengecam pimpinan agama yang juga menjalankan kekuasaan politik yang cukup luas, tetapi Dia tidak mengijinkan seorang pun mengangkat Dia jadi Raja. Maka sekalipun pandangan-Nya mengenai golongan berkuasa bersifat revolusioner dalam prinsip, namun misi-Nya tidak digenapi dalam sarana politik.⁴⁰ Ketaatan Yesus kepada Bapa di dalam menjalani pelayanan-Nya dapat dilihat dari sikap ketidaktaatannya kepada yang jahat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Dia tidak tunduk kepada yang jahat, ketaatan Yesus Kristus selalu ditujukan pada kebenaran. Kita dapat lihat di sini, suatu bentuk ketaatan yang sempurna. Ketaatan Kristus yang sempurna ini tidak dapat dilakukan oleh siapa pun, karena Yesus Kristus adalah Allah. Penulis surat Ibrani juga menegaskan kembali sekalipun posisinya sebagai Anak, tetapi tetap taat kepada Allah untuk menjadi pokok keselamatan (Ibrani 5:8).

Ketaatan Manusia

Ketaatan merupakan tema yang sangat umum dan sangat akrab dengan orang percaya, sedangkan ajaran ketidaktaatan sesuatu yang asing.⁴¹ Ajaran ketaatan dan tuntutan ketaatan begitu beragam dari berbagai referensi yang ada. Beberapa ketaatan yang didapatkan dari referensi tersebut adalah: ketaatan kepada Tuhan, ketaatan dalam arti iman, ketaatan dalam arti negatif (menuruti pada dosa), ketaatan kepada Hukum Taurat, ketaatan dalam hubungan keluarga.⁴² Ketaatan yang dipakai di dalam bagian ini terdiri dari tiga kata yang menjelaskan ketaatan yaitu *hupakouo*, *peitbo*, *peitharacheo*.

⁴⁰ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, Etika* terj. Lisdia T. Gamadhi dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993) 308.

⁴¹ Togardo Siburian, “*Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Sosial Kristen*” 45.

⁴² John G. Stackhouse ed., *What Does It Mean To Be Saved?* (Grand Rapids: Baker Book House, 2002) 10.

Ketaatan Kepada Tuhan

Merupakan suatu tuntutan kepada orang percaya untuk taat kepada Tuhan di dalam keseluruhan hidupnya (Kisah Para Rasul 5:29, 32; Roma 6:12, 16:19; 2Kor. 7:15, 10:5; Flm. 21; Yak. 3:3, 4:7). Taat kepada Tuhan dalam dua bentuk *pertama*, *hupakouo* yang artinya taat kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini manusia tunduk kepada Tuhan. *Kedua*, *peitharcheo* menurut Vine's Expository Dictionary of New Testament Words yang berasal dari kata *peitho* yang mempunyai arti mendengarkan atau taat dan *arche* yang mempunyai arti sebagai aturan.⁴³ Seperti yang Petrus katakan dalam Kisah Para Rasul 5:29 "kita harus lebih taat kepada Tuhan dari pada kepada manusia." Di dalam pengertian ini, kita dapat melihat bahwa Petrus membicarakan tentang *rule* atau aturan. Ketaatan aturan Tuhan tidak dapat dikesampingkan oleh aturan manusia, karena aturan ketaatan kepada Tuhan itu sempurna. Ketaatan ini harus tetap diperingatkan secara terus menerus, karena setiap orang percaya juga masih menghadapi tantangan akan pencobaan dan dosa. Sejak manusia pertama, Tuhan menuntut ketaatan kepadanya, sesuai dengan aturan yang Tuhan telah tetapkan, tetapi manusia melanggar aturan itu, sehingga manusia gagal memenuhi ketaatan itu. Ketidaktaatan berawal dari ketertarikan hati akan buah tersebut dan munculnya keinginan jahat, maka langkah terakhirnya adalah ketidaktaatan.⁴⁴ Ketaatan kepada Tuhan adalah sama halnya dengan ketaatan kepada Kristus yang adalah Tuhan, di dalam hal ini Paulus berbicara tentang ketaatan bagi orang-orang yang sudah percaya.⁴⁵ Ketaatan selalu jadi bagian hidup orang percaya selama manusia hidup di dalam dunia.

Ketaatan dalam Arti Iman

Ketaatan dari seorang manusia berhubungan dengan iman, sebagai ekspresi dari imannya (Lukas 17:6; Roma 1:5; 16:26; 1Petrus 1:2; Galatia 3:9). Bahkan di dalam Lukas (Lukas 17:6), kata yang digunakan untuk hubungan dari iman dan taat adalah kata *hupakouo*. Kata ketaatan di sini bukan saja *obedience* (*hupakouo*), tetapi juga mempunyai kesejajaran arti juga dengan *faithful* (*pisteo*), *hupakouo* (*obedience*) merupakan ketaatan kepada perintah dari yang memiliki otoritas yang

⁴³ Vine, *An Expository...*, 806.

⁴⁴ Anthony A. Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah* terj. (Surabaya: Momentum, 2008) 167.

⁴⁵ J Knox Chamblin, *Paulus dan Diri* terj. Irwan Tjulianto dan Elsy Elisabeth Rau (Surabaya: Momentum, 2008) 170-171.

lebih tinggi. Sedangkan *pisteo* yang sering diterjemahkan secara singkat dengan iman, mempunyai arti pengakuan yang mempunyai relasi dengan Tuhan.⁴⁶ Seperti yang Paulus tulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma (Roma 1:5), di mana ketaatan dan iman berdampingan, merupakan satu kesatuan.

Ketaatan dalam Arti Negatif (menuruti dosa)

Tindakan yang menyimpang dari perintah Tuhan sering dikatakan sebagai ketidaktaatan, tetapi dalam ayat ini Paulus memberikan peringatan bahwa orang memberikan peringatan “Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.” (Roma 6:12). Kalimat “jangan lagi menuruti keinginannya” berarti “jangan lagi menuruti keinginan dosa.” Kemudian di dalam 2Tesalonika 1:8 pun Paulus menuliskan tentang keberdosaan yang diartikan dari sikap tidak mentaati Injil Yesus. Di dalam kedua ayat tersebut, kata yang dipakai disini bukanlah *apeitheo* yang mempunyai arti negatif dari ketaatan, tetapi tetap yang dipakai adalah *hupakouo*, yang berarti menuruti pada pemberi perintah, dalam hal ini yang dimaksud mentaati keinginan dosa. Sedangkan pada 2Tesalonika 1:8, kata *hupakouo* didahului dengan negasi (*mh.*) yang berarti tidak menundukkan diri pada pemberi perintah atau tidak taat kepada yang mempunyai otoritas.

Ketaatan Kepada Hukum Taurat

Di dalam Perjanjian Lama tuntutan kepada umat Tuhan sejak di gunung Sinai adalah ketaatan kepada Tuhan dengan acuannya adalah Hukum Taurat. Di dalam Perjanjian Baru, disinggung juga hal ini oleh Paulus baik di dalam 1Korintus 14:34, maupun di dalam Roma 8:7. Kedua ayat ini menggunakan kata *hupotasso* kata ini berbeda dengan *hupakouo* walaupun sama-sama mengindikasikan tentang ketaatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, *hupakouo* diterjemahkan sebagai *obey*, *obedience*, sedangkan *hupotasso* sebagai *subject*. Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament menjelaskan kata *hupotasso* ini dengan hasil ketundukkan seseorang terhadap peringatan, dalam hal ini adalah Hukum Taurat.⁴⁷ Kedua ayat di atas (Roma 8:7 dan 1Korintus 14:34) ketaatan diarahkan kepada *nomos* atau Hukum Taurat.

⁴⁶ Joseph H. Thayer, *Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament*, 512-513.

⁴⁷ Ibid, 645.

Ketaatan dalam Hubungan Keluarga

Paulus di dalam beberapa suratnya mengajarkan ketaatan di dalam suatu keluarga baik itu hubungan anak dengan orang tua, maupun hubungan istri dengan suami (Efesus 6:1; Kolose 3:18, 20; 1Timotius3:11). Ada tiga kata yang dipakai di dalam hubungan ketaatan ini, ketaatan anak kepada orang tuanya adalah *bupakouo*, *obey*, yang di dalam bagian ini mempunyai arti mendengarkan akan perintah atau nasihat.⁴⁸ Ketaatan (ketundukkan) seorang istri kepada suaminya menggunakan kata *bupotassō* atau *subject* yang mempunyai arti bukan menunjukkan perbedaan kedudukan bahwa suami lebih tinggi dari istrinya, tetapi menunjukkan bahwa istri memberikan dirinya untuk mendengarkan nasihat suaminya.⁴⁹ Kata lain yang dipakai dalam 1Timotius 3:11 adalah *faithful* atau *pistos* mempunyai pengertian dalam menjalankan perintah atau nasihat. Ketaatan di dalam keluarga begitu penting untuk Paulus ingatkan, karena di dalam konteks jemaat bukan Yahudi yang Paulus peringatkan ini, mempunyai pengajaran yang berbeda dengan keluarga-keluarga Yahudi yang sangat mementingkan ketaatan atau ketundukan seorang anak kepada orang tua, atau pun seorang istri kepada suaminya.

Ketaatan dalam Lingkup Sosial

Ketaatan yang lebih khusus lagi adalah ketaatan di dalam lingkup hubungan sosial, yang dimaksud adalah hubungan di luar hubungan pribadi manusia itu sendiri, yaitu hubungan ketaatan di dalam lingkungan sosial yang lebih luas, di dalam bagian ini termasuk dalam hubungan ketaatan hamba dan tuan, warga negara dan pemerintah.

Ketaatan kepada Para Pemimpin

Ketaatan lain yang merupakan ketaatan di dalam hubungan antar manusia adalah ketaatan antara hamba dan tuan (Matius 25:21; Lukas 19:17; 1Korintus 16:16; Kolose 3:22; Ibrani 13:17; 1Petrus 2:18; 5:5). Empat kata yang menggambarkan ketaatan disini adalah *pistos* ketaatan di dalam arti kesetiaan untuk melaksanakan perintah, *bupakouo* ketaatan yang mempunyai arti adalah taat pada perintah yang diberikan kepadanya, *peithō* mempunyai arti ketaatan dalam arti untuk mendengarkan, dan *bupotassō* ketaatan di sini mempunyai arti

⁴⁸ Ibid, 638.

⁴⁹ Ibid, 645.

untuk memberikan diri untuk berada di bawah kontrol yang lain. Ketaatan kepada para tuan ini menuntut akan kesetiaan, kesediaan melaksanakan perintah, bahkan Petrus mengajak untuk tetap menghormati para tuan yang bengis sekalipun.

Ketaatan kepada Pemerintah

Ketaatan yang terakhir adalah ketaatan yang ditujukan kepada pemerintah atau penguasa (Roma 13:1; Titus 3:1; 1Petrus 2:13). Kata “ketaatan” yang didapatkan berdasarkan referensi ayat-ayat yang ada, yang menunjukkan hubungan dengan negara memang tidak begitu banyak, tetapi hal ini sangat penting karena bagian-bagian ini yang sering dipakai sebagai pusat ajaran Kristen di dalam menjelaskan hubungan orang percaya dengan negara. Ayat-ayat yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah memakai kata yang sama yaitu *hupotassō* yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *subject* bukan *obey*. Kata *hupotassō* terdiri dari kata *hupo* yang berarti *under* dan *tassō* yang berarti *to arrange*. Kata ini mempunyai arti yang sama dengan memberikan diri atau menetapkan untuk tunduk kepada kekuasaan atau kontrol tertentu. Pengertian lain yang setingkat dengan itu adalah kesediaan untuk memberikan diri melaksanakan perintah atau nasihat.⁵⁰ Kata ketaatan ini tidak sama dengan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketaatan kepada Tuhan. Paulus menuliskan ini dengan maksud bahwa tidak semua negara itu jahat, tetapi negara itu sendiri tidak dapat menguasai seluruh hidup kita. Posisinya adalah sebagai penjaga dan mengatur, tetapi bukan mencampuri semuanya.⁵¹ Paulus di dalam suratnya kepada Titus menggunakan kata *peitharcheo* yang artinya adalah mendengarkan atau taat aturan. Sedangkan Petrus di dalam suratnya juga yang menunjukkan bahwa orang percaya harus tunduk atau taat kepada pemerintah atau penguasa, menggunakan kata yang sama juga dengan yang digunakan oleh Paulus di dalam surat-suratnya untuk menjelaskan kata ketaatan ini. Ketaatan yang dimaksud di dalam ayat-ayat yang dijelaskan di atas juga harus dipahami berdasarkan konteks negara pada saat itu, dan juga tidak dapat dilepaskan dari pengharapan orang percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang-orang percaya pada saat itu mempunyai pemahaman akan kedatangan Yesus

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Randall L. Frame & Alan Tharpe, *How Right Is the Right: A Biblical and Balanced Approach to Politics* (Michigan: Zondervan Publishing House, 1996) 106.

yang kedua kali adalah di dalam waktu yang tidak lama lagi sejak masa mereka tersebut. Sehingga itu salah satu yang menjadi fokus mereka juga.

SIKAP ETIS ORANG KRISTEN TENTANG KETIDAKTAATAN SIPIL BERDASARKAN PERJANJIAN BARU

Ketidaktaatan Sipil dalam Etika Sosial Politik

Etika seringkali digunakan di dalam kaitannya dengan suatu profesi (seperti etika profesi hukum, etika profesi dokter, dan lainnya), persoalan baik dan buruk (ketika diperhadapkan dengan suatu dilema), kesopanan (yang menyatakan suatu tindakan etis atau tidak). Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno kuno yaitu *ethos* di dalam bentuk tunggal yang mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamaknya *ta etha* adalah adat kebiasaan⁵², di mana pengertian yang terakhir ini dipakai Aristoteles yang nantinya menunjukkan pada filsafat moral.⁵³ Secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Pengertian ini sebenarnya belum cukup, Bertens membaginya menjadi tiga, *pertama* etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika adalah kumpulan asas atau nilai moral. *Ketiga*, etika adalah ilmu tentang yang baik atau buruk.⁵⁴ Etika mempunyai pengertian yang bersifat prinsipil, karena bukan hanya menyangkut perbuatan lahiriah, tetapi menyelidiki pada kedalaman motif dari perbuatan yang kelihatan itu. Sedangkan yang disebut dengan etis adalah suatu sifat yang menurut sistem etika yang ada atau baik secara etis. Etika mempunyai implikasi pada nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan manusia.⁵⁵

⁵² Kata etika mempunyai arti yang sama dengan kata moral (berasal dari bahasa latin, *mos* yang dalam bentuk jamak *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Kedua kata ini mempunyai pengertian yang sama hanya asal kata dari bahasa yang berbeda, etika dari bahasa Yunani sedangkan moral dari bahasa Latin.

⁵³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993) 4.

⁵⁴ Ibid, 6.

⁵⁵ Togardo Siburian, “Diktat Kuliah Etika Sosial Politik” (Bandung: STTB, 2010), tidak diterbitkan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, tidak lengkap bila dilepaskan dari lingkungan politisnya. Maka begitu juga dengan etika pribadi yang tidak dapat dilepaskan dari etika sosial. Di mana etika sosial mempunyai fokus yang lebih luas yaitu masyarakat itu sendiri. Etika sosial mempunyai pertimbangan pada tiga lapangan besar dalam standar-standar publik yaitu agama, etika, dan sosial, yang mempunyai keterkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan tentang apa yang baik, yang benar dan yang seharusnya.⁵⁶ Etika sosial Kristen lebih berfokus pada deskriptif, yaitu dengan mendasari pada pandangan Alkitab terhadap masyarakat dan permasalahannya, di mana mempunyai kewajiban alkitabiah. Beberapa karakteristik dari etika sosial Kristen adalah *pertama* berpusat kepada Allah, yaitu dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Mempunyai pengertian menundukkan diri dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, dengan prinsip kewajiban yang alkitabiah. *Kedua*, kristosentris, di dalam pengertian hakikat penebusan di dalam Kristus. Kehadiran Kristus ke dalam dunia sungguh-sungguh membawa suatu perubahan, bukan di dalam rangka mengabarkan tentang Kerajaan Allah, tetapi Kristus yang datang juga untuk melakukan reformasi dan transformasi dalam tatanan sosial juga. *Ketiga*, berpusat pada ajaran Alkitab, yang menjawab pada konteks di mana kita hidup.⁵⁷ Bukan suatu etika situasional, tetapi keabsolutan ajaran Alkitab yang dipakai untuk menjawab konteks, karena dari zaman ke zaman di dalam konteks yang berbeda memiliki pergumulan yang berbeda juga.⁵⁸ *Keempat*, adanya motif Kerajaan Allah, yaitu kasih dan keadilan. Etika sosial politik Kristen harus berdasarkan pada hal-hal tersebut, yang tanpa itu tidak dapat menilai secara benar dan terarah menurut kebenaran firman Tuhan.

Landasan Ketidaktaatan Sipil Kristiani

Hubungan Gereja dan Negara

Negara dan Gereja merupakan lembaga-lembaga yang berasal dari Tuhan, posisi di antara keduanya adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Gereja dan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hal ini bukan di dalam pengertian bahwa Alkitab adalah buku yang berisi kode-kode moral ataupun buku etika, tetapi ajaran-ajaran di dalam Alkitab melalui penafsiran yang tepat dapat menjawab. Lih. Dennis P. Hollinger, *Choosing The Good* (Michigan: Baker Book House, 2002) 150-153.

⁵⁸ Bukan seperti etika situasional Joseph Fletcher. Lih. Joseph Fletcher, *Situation Ethics* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1997).

negara secara hakiki terpisah, tetapi bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali. Togardo Siburian menyebutnya sebagai hubungan yang bersifat konsultatif fungsional, di mana memang pada hakikatnya keduanya terpisah dan tidak boleh disatukan, tetapi ada bidang-bidang yang sama yang harus dikerjakan keduanya.⁵⁹ Posisi keterpisahan di antara keduanya ini haruslah dijalankan dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam kebijakan-kebijakan keduanya. Negara tidak boleh ikut campur di dalam masalah keimanan, sedangkan Gereja juga hanya sebatas pada pemberian masukan kepada negara. Keduanya dapat saling mendukung di dalam kemajuan dan perbaikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Gereja harus memperjuangkan moralitas dalam kebenaran dan keadilan di masyarakat.⁶⁰ Richard Mouw menyebutnya sebagai “*true church*” yaitu ketika Gereja sebagai komunitas orang percaya di dalam setiap area dan aktivitasnya serta dalam hubungannya dengan apa pun mencerminkan karakter Kristen termasuk di dalam hubungan dengan negara.⁶¹ John Stott menyebutnya sebagai doktrin yang lebih genap bagi Gereja, yaitu Gereja memang merupakan komunitas yang dipanggil keluar, tetapi tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah “mendunia” bukan duniawi.⁶² Panggilan Gereja atas dunia ini bukanlah berkuat dalam aksi filantropis semata,⁶³ tetapi sebagai agen transformasi di dalam dunia.

Tanggung Jawab Orang Kristen terhadap Negara

Orang Kristen sebagai warga sipil di mana pun dia berada mempunyai kewajiban kepada negara, bukan mengambil sikap memisahkan diri dan tidak peduli dengan negara. Orang Kristen pada dasarnya harus bersikap kepada negara adalah taat (*submission*), ketika negara itu menjalankan kuasanya dengan sah dan dengan benar. Sekalipun pemerintah tidak sah (atau sedikit-dikitnya

⁵⁹ Togardo Siburian, *Kerangka Teologi Religionum Misioner* (Bandung: STTB, 2004) 177.

⁶⁰ Togardo Siburian, “Diktat Kuliah Etika Sosial Politik”.

⁶¹ Richard J. Mouw, *Politics and the Biblical Drama* (Grand Rapids: Baker Book House, 1976) 66.

⁶² John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 1996) 20.

⁶³ Togardo Siburian, “Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Sosial Kristen”, 53.

dianggap tidak sah), tetapi ketika sudah menikmati apa yang diberikan pemerintah itu berarti sudah menerima dan mengakui baik keberadaannya maupun kekuasaannya.⁶⁴ Salah satu sikap orang Kristen terhadap negara yang tidak tepat didasari oleh pemahaman yang salah tentang Roma 13. Banyak yang memahami Roma 13:1-7 dengan tidak tepat, karena banyak dijadikan dasar oleh orang Kristen sebagai jawaban di dalam menghadapi permasalahan di dalam negara tanpa penjelasan yang benar, maka Manfred Brauch mengingatkan untuk berhati-hati di dalam membaca bagian ini dan memperhatikan konteksnya.⁶⁵ Hal ini pun dikatakan John Stott bahwa bagian ini tidak dimaksudkan di dalam segala masa Perjanjian Baru yang juga pernah ada di bawah pemerintahan penguasa-penguasa yang berbeda seperti Herodes, Nero, Domitianus atau di waktu masa sekarang seperti pemerintahan Hitler, Stalin, Saddam.⁶⁶ Tentu saja surat Roma ini bukan teologi secara universal tentang negara, tetapi ini ditujukan pada keadaan yang spesifik pada masa itu, dengan kata lain Roma 13 bukan pusat pengajaran di dalam Perjanjian Baru yang mengatur hubungan antara orang percaya dengan negara.⁶⁷ Sikap ketaatan harus dimengerti di dalam kerangka kemurahan Tuhan dan berdasarkan suara hati.

Bukan Merevolusi

Kehadiran Gereja di dalam dunia tidak untuk memikirkan kepentingan sendiri, tetapi sebagai agen Allah di dalam mentransformasi dunia ini dalam permasalahan-permasalahan sosialnya, panggilan Gereja harus dipahami dengan benar, bukan untuk menyangkali dunia ini tetapi harus melibatkan diri dalam permasalahan-permasalahan di dalam dunia.⁶⁸ Panggilan Gereja di dalam keberadaannya negara yang “melenceng” tidaklah tepat bila mengambil sikap

⁶⁴ Disadur dari pernyataan Joseph Tong dalam kuliah *Contemporary Sociology and Social Problem in Christian Perspective*.

⁶⁵ Manfred T. Brauch, *Ucapan Paulus yang Sulit* terj. Fenny Veronica (Malang: SAAT, 1997) 66.

⁶⁶ John Stott, *Romans: God's Good News for The World* (Illinois: InterVarsity Press, 1994) 340.

⁶⁷ John Howard Yoder, *The Politics of Jesus* (Michigan: William B. Eerdmans, 1982) 195.

⁶⁸ Ferry Y. Mamahit, “Globalisasi, Gereja Injili dan Transformasi Sosial” dalam *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* (Malang: SAAT, 2005) 264

pasif mutlak, tetapi harus memberikan kontribusi yang positif.⁶⁹ Gereja pun di dalam menghadapi negara yang menjadi tirani atau melaksanakan kekuasaannya dengan tidak benar maka ketidaktaatan sipil berhak dilakukan. Ketidaktaatan sipil dilakukan bukan dengan tujuan menggulingkan suatu pemerintahan, tetapi membawa panji kebenaran, yang dilakukan dengan cara yang tidak berdosa. Transformasi bukan suatu usaha yang sengaja dan direncanakan sedemikian rupa dengan langkah-langkah yang ditentukan, tetapi secara wajar dan nyata mampu mengubah masyarakat, dan dapat menjadi referensi sosial di dalam masyarakat.⁷⁰ Kekristenan sebenarnya sanggup menjadi kekuatan yang membebaskan masyarakat, tetapi kekuatannya belum terpancar.⁷¹

Ketidaktaatan Sipil Kristen bukan didukung dengan cara-cara kekerasan untuk menyatakan kebenaran, karena perjuangan kebenaran dengan cara seperti itu adalah revolusi yang tanpa Tuhan.⁷² Walaupun dalam situasi yang terjepit sekalipun tidak pernah Yesus ataupun para Rasul mengajarkan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan cara angkat senjata atau revolusi (pemberontakan). Pada dasarnya Revolusi memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan perlawanan tanpa kekerasan (*nonviolence resistance*). Revolusi merupakan suatu perubahan yang radikal dari posisi sosial, dengan cara kekerasan dan paksaan, yang akan menuntut banyak korban dan tujuan yang dicapai belum tentu membawa perbaikan. Sedangkan perlawanan tanpa kekerasan adalah tindakan yang sesuai prosedur untuk merubah situasi di dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk perdamaian.⁷³ Perlawanan tanpa perlawanan adalah pasivisme yang kritis bukan di dalam pasivisme yang absolut. Revolusi pada hakikatnya memiliki keinginan menggulingkan kembali, memimpin kembali secara baru, dan membakar sampai berkobar-kobar.⁷⁴ Jauh lebih baik melakukan reformasi dengan berusaha menggugah hati nurani daripada menanggapi kekacauan moral dan ketidakadilan dengan jalan revolusi.

⁶⁹ Philip E. Hughes, *Christian Ethic in Secular Society* (Michigan: Baker Book House, 1983) 190.

⁷⁰ Togardo Siburian, "Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Kristen", 65. band. Ferry Y. Mamahit, "Globalisasi, Gereja Injili dan Transformasi Sosial" 268-275.

⁷¹ Abraham Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial* terj. Calvin Budiman (Surabaya: Momentum, 2004) 27.

⁷² Togardo Siburian, ... 64.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Dorothy I. Marx, *Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa*, (Bandung: 2003) 54.

Kekuasaan Negara dari Allah

Orang percaya pada dasarnya diajak untuk bersikap taat kepada pemerintah, tetapi batasan yang ada jelas, bahwa otoritas tertinggi di mana orang percaya harus mutlak taat adalah pada Allah. Negara tidak diberikan kekuasaan yang absolut oleh Allah, “*believers must place their commitment to God before the dictates of the state.*”⁷⁵ Negara diberikan kuasa oleh Allah yang mempunyai tujuan sebagai pelayan untuk kebaikan, bukan untuk mendominasi.⁷⁶ Pemerintah yang adalah alat Allah mempunyai otoritas yang terbatas, mengingat juga bahwa pemerintah ini ada di dalam natur manusia yang berdosa, sehingga selalu ada kemungkinan untuk menyimpang dari kekuasaannya. Meskipun ada yang berpandangan bahwa taat kepada negara adalah sama halnya dengan taat kepada Allah di dalam cara yang lain.⁷⁷ Negara memiliki kekuasaan, karena pemberian Allah (*God given*), maka kekuasaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Allah, maka negara tidak bisa menguasai seluruh aspek kehidupan, bahkan di dalam bidang politik pun terbatas.⁷⁸ Negara atau penguasa harus dipahami sebagai pelayan Allah, hamba Allah, maka ketika mereka melakukan yang tidak selaras dengan kewenangan yang diberikan Allah untuk mengatur rakyatnya dengan benar dan adil, mereka tidak dapat disebut sebagai pelayan Allah lagi.⁷⁹

Philip Hughes mengatakan bahwa segala kekuasaan yang dimiliki firman Tuhan memberikan pandangan yang tinggi akan otoritas yang dimiliki negara, tetapi pada saat yang bersamaan otoritas itu sendiri berada di bawah otoritas kedaulatan Allah sebagai Pencipta dan Penentu segalanya,⁸⁰ kuasa yang diberikan Allah kepada negara tidaklah otonom, karena negara mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Paulus di dalam surat Roma dengan jelas mengatakan bahwa keberadaan negara adalah untuk kebaikan, jika negara melakukan yang

⁷⁵ Doug Bandow, *Beyond Good Intentions: A Biblical View of Politics* (Westchester: Crossway Books, 1988) 75.

⁷⁶ Randall L. Frame & Alan Tharpe, *How Right is the Right? A Biblical and Balanced Approach to Politics* (Michigan: Zondervan Publishing House, 1996) 99.

⁷⁷ Bonhoeffer, *Ethics* (The Macmillan Company, 1969) 347.

⁷⁸ Benyamin Fleming Intan, “*Caesar’s Coin* dan Hubungan “Gereja Negara” dalam Era “Orde Baru:” Suatu Pandangan dari Perspektif Reformed”, 184.

⁷⁹ Yoder, *The Politics...*, 207.

⁸⁰ Hughes, *Christian...*, 189.

sebaliknya maka orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk tidak taat.⁸¹ Perlawanan ini adalah perlawanan yang berdasarkan ketaatan kepada Tuhan saja, ketaatan untuk tunduk pada otoritas Allah. Ketaatan mutlak kepada Allah bukan hanya di dalam posisi yang terjepit, tetapi taat kepada kebenaran yang Allah inginkan. Setiap institusi yang ada, tidak peduli seberapa kuatnya, harus selalu dilihat apakah itu melaksanakan akan kehendak Allah atau menyimpang dari kebenaran.⁸²

Orang Kristen sebagai warga sipil harus menyadari hak-haknya di dalam negara, seperti yang Paulus lakukan di dalam menuntut hak-haknya ketika dilanggar (lih. Kisah Para Rasul 16:35-40; 22:22-29; 25:8-12). Hughes menambahkan, “*And in the event that the state ordered the public denial of the lordship of Christ, the Christian’s citizenship in heaven took precedence over his citizenship in this world and he followed the way of civil disobedience.*”⁸³ Di dalam situasi pemerintah yang sah dan menjalankan kekuasaannya dengan adil, maka ketaatan kepada pemerintah adalah suatu keharusan, tetapi ketika pemerintah telah menjalankan kekuasaannya melebihi kuasa yang diterimanya, maka Gereja mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Togardo Siburian mengatakan “jika dan hanya jika, pemerintah melebihi kuasa yang diberikan Allah, maka Allah tidak ada disitu lagi, bahkan kita dapat menarik dukungan dan menolak kebijakannya secara tidak kacau.”⁸⁴ Perjanjian Baru sendiri mengakui bahwa tidak semua negara baik, Kitab Wahyu menggambarkan negara sebagai penanding umat Allah.⁸⁵ Eka Darmaputera yang berdasarkan pemikiran Martin Luther mengatakan bahwa ketaatan kepada negara adalah “ketaatan yang paradoksal” maksudnya ketaatan iman dapat terwujud dalam bentuk ketidaktaatan dalam iman, dengan menggunakan istilah *responsible obedience* yang disenafaskan dengan *responsible disobedience*.⁸⁶ Memang benar ketidaktaatan sipil itu harus dapat dipertanggung jawabkan, tetapi bukan berarti ada paradoks di dalam keimanan,

⁸¹ Bandow, *Beyond...*, 75.

⁸² Paul Ramsey, *Basic Christian Ethic* (Louisville: Westminster, 1992) 339.

⁸³ Hughes, *Christian...*, 190.

⁸⁴ Togardo Siburian, “Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Kristen”, 50.

⁸⁵ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, Etika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 308.

⁸⁶ Eka DaRomaaputera, “Bukan Keterpisahan, Tapi Kemitraan. Beberapa Catatan Sekitar Hubungan Agama dan Negara: Refleksi Seorang Kristen Protestan” dalam dalam *Etika Politik dalam Konteks Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2005) 127.

karena iman harus selaras dalam perbuatannya, dan ketidaktaatan sipil ini sebagai respons untuk menegaskan akan kebenaran.

Gereja harus mempunyai keberanian untuk menyuarakan akan kebenaran dan keadilan, bukan hanya mengambil sikap pasif, menerima dan tidak melakukan apa pun untuk kemasyarakatan, Henry melanjutkan “*Social passivity is no strategy at all*”.⁸⁷ Di dalam menentukan sikap etis menghadapi permasalahan sosial, dapat melakukan yang King lakukan yaitu bahwa penindasan dan kejahatan harus dilawan, apa pun bentuk ketidakadilan itu baik berhubungan dengan persoalan rasial, ekonomi, politik.⁸⁸ Di dalam alam demokrasi Indonesia, rakyat tidak hanya diberikan hak istimewa tetapi juga kewajiban, di mana rakyat seharusnya menjadi juri terakhir dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar.⁸⁹ Gereja selayaknya menyadari akan tanggung jawab ini di dalam keberadaannya di dalam negara Indonesia. Orang-orang Kristen sebagai warga sipil mempunyai peran yang signifikan, bukan hanya sekadar sebagai penikmat atau bahkan sebagai penderita, tetapi mempunyai tanggung jawab yang penting. Setiap orang Kristen bertanggung jawab juga terhadap keberadaan sesamanya.

Ketidaktaatan sipil tidak mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting dari itu menyatakan kebenaran. Gereja tidak harus mengalami penderitaan terlebih dahulu baru kemudian menyuarakan bahwa kekuasaan negara itu terbatas, tetapi Gereja sebagai komunitas orang percaya mempunyai tanggung jawab sipil untuk mendorong negara berada di jalan kebenaran dan Gereja mempunyai tanggung jawab etika.

Gereja Tidak Berpolitik Praktis

Gereja yang berpolitik adalah suatu debat yang panjang, walaupun banyak yang berpendapat bahwa tidak merupakan hal yang salah Gereja berpolitik, karena akan membuat negara menjadi lebih baik,⁹⁰ tetapi hal tersebut sebenarnya

⁸⁷ Carl F. H. Henry, *Aspect of Christian Social Ethics*, (Michigan: Baker Book House, 1980) 16.

⁸⁸ William D. Watley, *Roots of Resistance* (Valley Forge: Judson Press, 1985) 129.

⁸⁹ Sir Fred Catherwood, “Orang Kristen Dan Politik” *Allah Dan Kebudayaan* terj. (Surabaya: Momentum, 2002) 252.

⁹⁰ Lihat Dennis P. Hollinger, *Choosing The Good* (Michigan: Baker Academic, 2002) 264-265.

merupakan suatu campuran yang tidak dapat dicampur berdasarkan panggilannya masing-masing di dalam dunia ini. Gereja tidak dapat dilepaskan dalam entitas politisnya, tetapi dalam hal ini bukan berarti Gereja berpolitik praktis, tetapi menyangkut pada panggilan gendanya, dikuduskan dan untuk memberikan pengaruh pada dunia. Gereja hadir bukan hanya untuk menghakimi, menghukum, tetapi Gereja sebagai penyembuh.⁹¹

Pengaruh iman Kristen dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik ini akan sangat kuat, jika Gereja tetap mempertahankan kesederhanaannya dan berpegang pada prinsip-prinsip idealnya.⁹² Tugas Gereja bukanlah untuk berkuasa, tetapi melayani, membina kerohanian, di mana komunitas orang percaya mencerminkan nilai-nilai moral dan rohani berdasarkan imannya dalam kehidupan sosialnya. Gereja yang terlibat di dalam politik praktis akan menjerumuskan pada situasi kelam, yang nantinya akan jatuh pada superioritas agama. Gereja tidak boleh ikut bermain dalam politik praktis, sebaliknya politik juga tidak boleh memeralat cara-cara keagamaan.⁹³ Gereja yang mencemplungkan diri dalam politik praktis pasti akan melenceng dari panggilan yang sejatinya.

Ketidaktaatan Sipil Kristen

Minimnya pengaruh orang Kristen di dalam menyatakan kebenaran di negara ini adalah karena pemahaman yang tidak tepat akan ketidaktaatan sipil itu sendiri. Ketidaktaatan sipil yang Kristen ini mempunyai, prinsip-prinsip yang jauh dari kesan jahat dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ketaatan ini harus benar-benar menyesuaikan pada kehendak Allah, karena di dalam posisi otoritas Dia adalah yang tertinggi dari segala otoritas yang ada, otoritasnya yang *mastery*, yaitu melebihi kekuatan manusia.

Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa adalah contoh ketaatan yang sempurna (Roma 5:19), di mana manusia belajar harus memberikan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah, karena Allah adalah kebenaran sejati, sedangkan negara atau penguasa yang berisikan juga manusia-manusia yang ada dalam natur

⁹¹ Andre Dumas, *Political Theology and the Life of the Church* (Philadeldphia: The Westminster Press, 1973) 23.

⁹² Kuyper, *Iman...*, 47.

⁹³ Lihat Togardo Siburian, "Demokrasi, Politik, Dan Keprihatinan Kristen Di Indonesia" dalam *Jurnal Teologi STULOS* (Bandung: SITB, 2007).

dosa selalu terbuka kemungkinan untuk berbuat tidak benar. Kita dapat mengambil suatu pengertian ketidaktaatan sipil ini bukan hanya dilakukan ketika berada di dalam situasi terjepit, tetapi di dalam situasi orang Kristen melihat bahwa negara sudah tidak lagi menjalankan kekuasaannya sesuai dengan batasannya, karena belum tentu di dalam posisi seperti itu orang Kristen sudah ada di dalam posisi yang terpojok, tetapi pasti sudah muncul ketidakadilan dan penyimpangan dari kebenaran. Sehingga sikap ketidaktaatan sipil juga bukan dilakukan dengan cara-cara liar yang kacau, serampangan, tetapi benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan.

Perlawanan Karena Iman

Ketaatan yang dituntut kepada orang percaya baik dalam hubungannya dengan pemerintah (Roma 13:1; Titus 3:1; 1Petrus 2:13), dengan menggunakan kata *hupotasso* dengan arti memberikan diri atau menetapkan untuk tunduk kepada kekuasaan atau kontrol tertentu. Orang Kristen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari iman mereka, harus merupakan suatu kesatuan antara iman dan kehidupan. Sama halnya dengan ketaatan kepada negara, di mana ketaatan itu harus sesuai dengan iman Kristen, maksudnya adalah bukan taat ketika negara itu merupakan negara Kristen, atau pemimpin negaranya Kristen. Ketaatan itu harus berdampingan, selaras dengan iman, ketika negara menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan iman Kristen maka adalah benar jika tidak taat.

Ketaatan kepada negara juga bukanlah perintah untuk taat secara membabi buta, tetapi ketaatan di dalam Kristus. Paulus di dalam berbagai penjelasan tentang ketaatan tidak terlepas di dalam hubungan dengan iman Kristen, yaitu haruslah di dalam Kristus (Efesus 6:1; Kolose 3:20, 22). Begitu juga dengan Petrus yang menekankan akan ketaatan kepada lembaga manusia termasuk pada penguasa (negara), mengawali dengan “Tunduklah, karena Allah...” (1Petrus 2:13). Ketidaktaatan sipil kristiani dilakukan harus selaras dengan iman Kristen yang menjunjung kebenaran, keadilan, seperti yang orang percaya lakukan di dalam Kristus.

Berdasarkan Kasih

Prinsip kasih di dalam menghadapi ketidakadilan dan ketidakbenaran bukanlah di dalam posisi yang mutlak pasif atau ekstrem lainnya adalah dengan cara perlawanan kekerasan. Perlawanan tanpa kekerasan harus didasarkan pada

prinsip kasih. Berbicara tentang kasih berarti segala tindakan perlawanan yang dilakukan bukan dalam tendensi kebencian atau sentimen pribadi pada pemerintah yang berkuasa, tetapi semata-mata untuk kebenaran. Paulus memperingatkan untuk tidak bertengkar (menggunakan kekuatan militer, kekuatan fisik), karena cara-cara tersebut hanya akan menimbulkan suatu permusuhan, pencideraan, dan kebenaran akan gagal dinyatakan. Perlawanan berdasarkan kasih ini bukan saja tanpa kekerasan, tetapi tidak ada kecenderungan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi (egosentris). Kasih yang menjadi prinsip itu adalah berdasarkan kasih Allah yang bersifat penebusan juga. Perlawanan bukan ditujukan pada pribadi-pribadi tertentu, tetapi kepada kejahatannya atau kesalahannya, sehingga cara-cara yang dilakukan tidaklah menyebabkan kekacauan, keresahan, arogansi, tetapi suatu sikap aktif yang santun dan lemah lembut. Bukan dengan kekerasan jasmani, tetapi melalui cara-cara intelektual. Hal ini juga akan tercermin di dalam sikapnya yang tidak akan menghakimi tetapi lebih pada pernyataan akan kebenaran.

Penegakan Kebenaran

Ketika negara menjalankan kekuasaannya melebihi dari yang seharusnya, maka negara tersebut tidak lagi menjalankan kuasanya berdasarkan kebenaran, negara menjadi tirani. Ketidaktaatan sipil kepada negara tidaklah sama dengan ketidaktaatan bangsa Israel yang dapat diartikan *transgression* yang berarti pelanggaran hukum Allah. Ketika negara menjalankan kekuasaannya dengan melebihi otoritasnya, maka Allah sudah tidak menyertainya lagi. Dengan kata lain, perlawanan terhadap negara yang demikian tidak sama dengan perlawanan terhadap Allah. Negara yang menjadi tirani menggunakan kekuasaannya tanpa berdasarkan hukum Allah. Maka ketidaktaatan sipil yang dilakukan mempunyai tujuan untuk menegakkan kebenaran, menyatakan keadilan, mengoreksi kesalahan.

Ketidaktaatan sipil dilakukan melampaui pada keterpojokan “iman pribadi” tetapi melihat secara lebih luas lagi yang dimaksud dengan kebenaran Allah. Baik Petrus maupun Paulus di dalam menyatakan kebenaran ketika berada di dalam persidangan. Petrus berkata “Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada kamu atau taat kepada Allah.” Ini bukanlah seruan keterpojokan, meskipun Petrus dan Yohanes tidak berada di dalam persidangan, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Petrus melanjutkan kalimatnya “Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang

telah kami lihat dan yang telah kami dengar”. Meskipun seruan ini dikatakan di hadapan Mahkamah Agama, tetapi prinsipnya sama ketika yang dihadapi adalah kekuasaan negara. Tidak adanya unsur keterpojokan di sini, bahwa Petrus menyatakan Allah adalah yang mutlak benar dan harus ditaati apa pun situasinya. Ketidaktaatan sipil haruslah menjadi jalan terakhir, maksudnya ketidaksetujuan akan tindakan serta kebijakan negara, dimulai dengan adanya peringatan atau himbauan untuk negara mendengar dan mengoreksi diri.

Melawan Kejahatan

Ketidaktaatan sipil tidak memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan, karena orang percaya atau kekristenan tidak mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi untuk memberi pengaruh dan melayani. Maka ketidaktaatan sipil Kristen ditujukan pada perlawanan akan kejahatan, perlawanan akan ketidakadilan, termasuk di dalamnya adalah perlawanan terhadap ketidakbenaran. Paulus mengatakan baik di dalam surat Roma maupun Tesalonika untuk tidak menuruti dosa, kejahatan, dan suatu keberdosaan jika tidak menuruti akan perintah Tuhan, sehingga mempunyai pengertian akan seruan untuk bersikap tidak taat terhadap segala bentuk kejahatan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh negara juga. Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan ketaatan baik *hupotasso*, *peitho* mempunyai pengertian kesediaan untuk tunduk, taat kepada otoritas yang di atasnya (negara), serta kesediaan untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pemberi perintah, maka ketika negara melakukan kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan, maka berhak untuk menarik kesediaan tersebut. Orang Kristen sebagai warga sipil berhak untuk mempunyai hak untuk tidak tunduk dan tidak mendengarkan pada perintah negara, ketika negara melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Hati Nurani Yang Murni

Perlawanan dengan hati nurani yang murni adalah perlawanan yang tanpa tendensi pada nafsu kekuasaan. Bukan seperti Jose Miranda dalam Teologi Pembebasannya yang memandang bahwa ketidaktaatan sipil menuntut peralihan kekuasaan, dan hal ini dibarengi dengan cara-cara kekerasan yang dilegalkan untuk mencapai keadilan sosial. Ketidaktaatan sipil dilakukan dengan motif untuk menegakkan kebenaran, bebas dari pengaruh perebutan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan yang ada. Hati nurani yang murni berdasarkan pada iman Kristen ini berimplikasi pada cara-cara yang dipakai untuk ketidaktaatan sipil tersebut, yaitu dengan kasih, tanpa kekerasan, tanpa nafsu kekuasaan,

berpusat pada Allah (dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah). Paulus yang begitu menekankan akan ketaatan kepada pemerintah (Roma 13:1), tetapi di dalam penjelasannya lebih lanjut dia mengatakan tentang hati nurani (Roma 13:5). Ketaatan kepada negara dilakukan bukan karena suatu keterpaksaan karena takut akan hukuman Tuhan, tetapi adalah suatu kajian juga berdasarkan hati nurani yang murni di dalam memandang tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kemurnian hati nurani ini memberikan kebijaksanaan kapan waktunya untuk taat dan kapan waktunya untuk tidak taat. Ketika ketidaktaatan berdasarkan hati nurani yang di dalam Kristus, maka penyampaian ketidaktaatan ini juga harus berdasarkan hati nurani di dalam Kristus.

Implementasi Ketidaktaatan Sipil terhadap Panggilan Gereja

Suara Kenabian Gereja

Tidak sedikit Gereja di Indonesia pada masa ini yang mempunyai kepedulian sosial, baik kepada kemiskinan, kerukunan antar umat beragama, tetapi banyak juga Gereja yang tidak mempedulikan akan kondisi sosial di masyarakat, sehingga hanya mengisi “ke dalam” terus dan tidak berdampak apa pun. Nabi-nabi di masa Perjanjian Lama pun dengan gamblangnya memaparkan ketidakadilan sosial yang terjadi, mereka menantang raja-raja, para pemimpin agama, dan masyarakat karena kejahatan serta kegagalan moralnya. Yesus pun melanjutkan tradisi ini di mana di dalam diri-Nya tergenapi jabatan imam, raja, dan nabi. Gereja di dalam negara bukan hanya mengambil bagian secara privat untuk negara, tetapi menyerukan kebenaran itu, Gereja harus dapat memimpin orang-orang untuk mengerti pemerintah sebagai penjaga keadilan.⁹⁴ Gereja tidak dipanggil untuk berpangku tangan melihat ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia, termasuk berhadapan dengan negara. Orang Kristen memang berpegang pada prinsip kasih di dalam perjalanan imannya, tetapi bukan berarti ketika ketidakadilan terjadi maka Gereja diam saja, membiarkan. Gereja harus menyerukan kebenaran sebagai kebenaran, bukan merelatifkan semuanya.⁹⁵

Garam dan Terang Dunia

Banyak gereja yang tidak terasa pengaruhnya di dunia karena gereja sendiri merasa terasing dari dunia ini, atau pada ekstrem yang lainnya gereja melebur

⁹⁴ Stott, *Isu-Isu...*, 81.

⁹⁵ Catherwood, *Orang Kristen...*, 236.

dengan dunia sampai tidak ada bedanya dengan dunia karena tidak dapat mempertahankan keunikan gereja itu sendiri. John Stott mengungkapkan bahwa gereja adalah “garam dan terang dunia” (Matius 5:13-16), menunjukkan perbedaan yang jelas antara Gereja dengan dunia ini, perbedaan yang radikal antara garam dan kebusukan, serta terang dan kegelapan.⁹⁶ Orang Kristen sebagai garam dan terang adalah naturnya, bukan menjadi, maksudnya jika orang Kristen sudah otomatis mereka sebagai garam dan terang. Garam dan terang harus ada di tempat yang sungguh-sungguh mereka dibutuhkan, sehingga dampaknya terasa dengan nyata, sama seperti orang Kristen atau Gereja yang ditempatkan di dunia yang berdosa, orang percaya bukan hidup secara terisolasi, tetapi harus terlibat di dalam dunia untuk menyatakan kebenaran.⁹⁷ Menurut Carl Henry kepedulian Gereja terhadap permasalahan keadilan sosial bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu perintah di dalam memenuhi tanggung jawab sipilnya, karena itu menurutnya kebutuhan utama Gereja adalah untuk mengerti tugas dasarnya.⁹⁸ Pergerakan Gereja di dalam menjalani dua sisi panggilannya, terutama dalam “panggilan mendunia tapi tidak duniawi” bukan berarti Gereja mencampurkan diri di dalam dunia politik. Ketika Gereja ikut serta dalam politik praktis, maka martabat Gereja akan hancur.⁹⁹

Meneruskan Reformasi

Kekristenan di Indonesia memang termasuk ke dalam minoritas, tetapi ketidaktaatan sipil bukan semata-mata melindungi kepentingan minoritas, namun pada kepentingan kebenaran. Pemahaman banyak orang Kristen tentang ketidaktaatan sipil secara sempit adalah boleh dilakukan ketika adanya pelanggaran negara di dalam keimanannya, seperti pelanggaran untuk beribadah kepada Tuhan. Memang unsur keterpaksaan ini akan selalu ada, tetapi bukan hal ini yang menjadi alasannya. Tetapi harus dilihat di dalam konteks saat ini bahwa ketidaktaatan sipil dilakukan untuk kemanusiaan dan keadilan di alam demokrasi yang menjamin hak bersuara dan berpendapat.¹⁰⁰ Bahkan ketidaktaatan sipil ini

⁹⁶ John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*, hl. 21.

⁹⁷ Carl F. H. Henry, “Evangelicals in the Social Struggle” dalam *Salt and Light: Evangelical Political Thought in Modern America* (Michigan: Baker Book House, 1989) 32.

⁹⁸ Carl F. H. Henry, *Aspect of Christian Social Ethics* (Michigan: Baker Book House, 1980) 10.

⁹⁹ Henry, *Aspect...*, 106.

¹⁰⁰ Togardo Siburian, “Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Sosial Kristen”, 47.

harus melebihi perjuangan “agama Kristen” semata, tetapi secara lebih luas melihat kepentingan untuk keadilan, karena bukan keterpojokan maka ini adalah suatu tindakan intelektual, yang terstruktur dan sistematis. Ketidaktaatan sipil harus dipahami bukan dalam pengertian sempit hanya sekadar untuk membela “agama” (yang seringkali tidak sesuai dengan iman), perlawanan atas nama agama ini sangat terkait dengan posisi yang sudah terjepit atau terpojok, padahal ketidaktaatan sipil bukan dilakukan dalam situasi seperti itu saja. Kekristenan pada hakikatnya bukanlah agama, tetapi wahyu Tuhan, tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa secara filosofis di dalam kekristenan terkandung nilai-nilai keagamaan. Perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan warga sipil dalam arti politis bukan perlawanan warga (agama), tetapi tetap Gereja di dalam sikap a-politis.¹⁰¹ Maka perjuangan Gereja seharusnya diarahkan pada meneruskan semangat reformasi di negara ini, yaitu untuk senantiasa memerlukan pembenahan di dalam berbagai aspeknya. Semangat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

KESIMPULAN

Ketika berbicara ketidaktaatan sipil, hal ini pasti akan terjadi ketika orang Kristen diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat kepada Tuhan atau kepada pemerintah yang menyimpang. Sesungguhnya ketidaktaatan sipil bukan di dalam pengertian ketika di dalam posisi yang terjepit, tetapi ketidaktaatan sipil orang Kristen melampaui hal itu. Standarnya haruslah pada suatu kebenaran, keadilan, kemanusiaan banyak orang, bukan secara pribadi saja. Di Indonesia dengan jelas terpampang banyaknya kekeliruan dan ketidakkonsistenan yang dilakukan. Mulai dari produk-produk hukum yang dibentuknya, di mana tidak sedikit yang bernafaskan agama mayoritas, padahal negara ini didasarkan bukan dengan dasar agama tertentu, karena Indonesia bukanlah negara agama. Lebih lagi ketika banyaknya pembentukan produk hukum yang tidak sesuai dengan hukum tertinggi di negara ini. Sekalipun jelas bertolak belakang dengan cita-cita dari bangsa ini, tetapi seperti “legitimasi buta” diberikan oleh negara demi kepentingan politik. Potret ketidakadilan di Indonesia seharusnya menjadi suatu stimulus untuk orang Kristen bertindak dan melakukan sesuatu, termasuk diperlukan suara dari gereja.

¹⁰¹ Ibid., 63.

Ketidaktaatan sipil di dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang tidak asing. Banyak pemahaman yang tidak lengkap yang menyebabkan kemandegan. Kemandegan lain yang mengakibatkan orang Kristen, bahkan Gereja tidak bersuara untuk kebenaran di dalam negara ini adalah pandangan tentang “negara Kristen” yang paling ideal. Atau pada sisi yang lain adalah pemahaman yang kebablasan, di mana Gereja ikut terlibat aktif di dalam politik praktis, termasuk di dalamnya ketika hamba Tuhan pun ikut terjun sebagai politikus. Semuanya ini membuat kontribusi orang Kristen terhadap negara adalah pada titik yang mengkhawatirkan. Berbicara tentang hubungan Gereja dan negara dalam perspektif Alkitab sering dikaitkan dengan Roma 13:1-7 atau 1Petrus 2:13-17. Sesungguhnya pemahaman ini tidak dapat dijadikan sentral pemahaman terhadap ketidaktaatan sipil. Tema ketidaktaatan sipil tidak muncul begitu saja di dalam Alkitab, tetapi dengan melakukan studi Alkitab yang secara spesifik di dalam Perjanjian Baru dengan mengangkat tema ketaatan, dapat ditemukan pemahaman yang cukup akan hal ini. Ketaatan kepada negara adalah ketaatan yang terbatas, bukan ketaatan yang membabi buta, sebaliknya ketaatan mutlak hanya ditujukan pada Allah.

Ketika berbicara tentang memilih ketaatan kepada Allah daripada kepada negara, penulis mendapatkan ini bukan di dalam posisi yang terpojok atau terjepit, tetapi lebih dari itu. Ketaatan kepada Allah harus termasuk di dalamnya adalah ketaatan kepada kebenaran yang Allah kehendaki. Memilih ketaatan yang sesuai dengan kehendak Allah ini, termasuk di dalamnya adalah menyatakan kebenaran dan keadilan di dalam dunia ini. Yesus melakukannya di dalam pelayanan-Nya. Dia memang tidak berpolitik praktis, tetapi Dia menyatakan kebenaran bukan dalam posisi kepepet, namun menyatakan yang benar dalam keadaan yang benar dan salah sebagai salah. Memilih taat kepada Allah juga adalah menolak kejahatan tidak berkompromi dengan dosa, termasuk kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh negara. Sekalipun hal ini tidak berdampak langsung pada orang Kristen, tetapi harus menyatakannya, karena ketika sesuatu adalah dosa dan orang Kristen diam saja, itu pun dosa.

Negara juga harus dipahami sebagai penerima kekuasaan dari Allah untuk melaksanakan fungsinya menjaga keadilan, mencegah kejahatan, mengusahakan yang baik untuk warga negara. Kelebihan penggunaan kekuasaan yang diberikan menjadikan negara itu menyimpang dari panggilannya. Orang Kristen harus paham dengan benar apa yang menjadi panggilannya di dalam negara, bukan sekadar sebagai penikmat atau penderita, sehingga selalu pasif. Tindakan aktif

untuk menyatakan kebenaran sangat penting. Gereja tidak dipanggil untuk berkuasa, tetapi untuk melayani.

Ketaatan ini harus benar-benar menyesuaikan pada kehendak Allah, bila ketaatan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah maka itu adalah ketaatan yang salah. Maka ketaatan orang Kristen kepada negara sebagai warga sipil, dapat menjadi ketidaktaatan sipil bila negara menjalankan kekuasaannya menyimpang dari otoritas yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, ketidaktaatan sipil ini dilakukan bukan di dalam posisi keterpojukan, karena ketika negara melakukan penyimpangan akan kebenaran dan keadilan, posisi orang Kristen belum tentu terjepit, dan belum tentu itu ditujukan secara langsung kepada orang Kristen. Di dalam hal inilah, perjuangan akan kebenaran dan keadilan ditegakkan, di mana ketidaktaatan sipil dibenarkan.

Ketidaktaatan sipil dilakukan bukan dengan cara-cara serampangan, liar, brutal, kacau, karena bila dengan demikian sama halnya kejahatan dilawan dengan kejahatan. Perlawanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi karena ketidaksesuaian dengan kebenaran berdasarkan iman Kristen. Kemudian kekerasan haruslah ditolak, prinsipnya melawan dalam kasih. Ketidaktaatan sipil diperkenankan untuk orang Kristen lakukan, bukan untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik tetapi sebagai pernyataan kebenaran dan keadilan.

Gereja harus berpikir ulang akan panggilannya di dalam dunia, termasuk di dalam negara. Jangan sampai Gereja hanya terus mengisi ke dalam, tanpa kontribusi apa pun. Suara kenabian Gereja sangat relevan di sepanjang masa, tidak boleh ditinggalkan. Menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Garam dan terang dunia jangan sampai hanya menjadi “slogan mati” tetapi benar-benar harus dihidupi, sehingga negara ini pun merasakan akan kasih Kristus.

REY REGINALDY menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) dan M.Div. dari STT Bandung. Sekarang sedang menjalani masa praktik selama satu tahun di salah satu gereja di Bandung.